

ABSTRACT

The multistakeholder in the management of Prambanan Area potentially causes problems. The Prambanan area lies in two administrative regions, which are Sleman, DIY and Klaten District, Central Java, resulting in complexity in the management of the area. The problems that occur in the management and conservation in Prambanan area is divided into two, the problem with the society and the one with local government. Problems occurred with the society is about the land ownership, in which most of the land owned by the society begins to be sought after by investors. While the problem with the Local Government (Bappeda) is related to the development of infrastructure in Zone 3 area of Prambanan. This research is qualitative research, by using observation, interviews and document study as the data collection method. While the method of the research is case study. The researcher found that the management of communications made by BPCB can be the solution of the problems that occur with local governments and society. However, BPCB had not been able to conduct all the stages of good communication management. Mainly, the management of communications made by BPCB can be regarded as one of the effective ways to overcome the problems of preservation in Prambanan area. Effective communication management is able to avoid miss communication and further, it can avoid conflicts between stakeholders.

Keywords: communication management, Prambanan area, government organizations, cultural heritage area

Keywords: communication management, Prambanan area, government organizations, cultural heritage area

ABSTRAK

Adanya *multistakeholder* dalam pengelolaan kawasan Prambanan, berpotensi menimbulkan persoalan. Lokasi kawasan Prambanan berada di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Sleman, DIY dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengakibatkan kerumitan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan dan pelestarian di kawasan Prambanan terbagi menjadi dua, yaitu persoalan dengan masyarakat dan persoalan dengan Pemerintah Daerah. Persoalan yang terjadi dengan masyarakat yaitu mengenai kepemilikan lahan, dimana sebagian besar lahan dimiliki oleh masyarakat dan mulai menjadi incaran para investor. Sedangkan persoalan dengan Pemerintah Daerah (Bappeda) berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di kawasan zona 3 kawasan Prambanan. Penelitian ini dilakukan dengan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti menemukan bahwa manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPCB dapat menjadi solusi dari persoalan yang terjadi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Namun, BPCB belum dapat menjalankan seluruh tahapan manajemen komunikasi dengan baik. Secara garis besar manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPCB bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan pelestarian di kawasan Prambanan. Manajemen komunikasi yang efektif, dapat menghindarkan adanya *miss communication* dan lebih jauh dapat menghindarkan dari adanya konflik antar *stakeholder*.

Kata kunci: manajemen komunikasi, kawasan Prambanan, organisasi pemerintah, kawasan cagar budaya